



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : LLDIKTI WILAYAH XIII

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFI' I M AMIN
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 511972

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.234.000.000

1. Tanah Seluas 931 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 988.4 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN Rp. 194.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.173.596

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.262.673.596

III. HUTANG Rp. 186.688.390

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.075.985.206

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.